

# Seri Webinar Asia Pacific Justice for All

26 September, 14 dan 28 Oktober

## Latar Belakang

Bangladesh Legal Aid Services Trust ([BLAST](#), Pelayanan Bantuan Hukum Bangladesh); [Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies](#) (Pelopor Keadilan, Keadilan dan Inklusifitas Masyarakat); [Open Government Partnership](#) (Kemitraan Pemerintah Terbuka) dan [Legal Empowerment Network](#) (Jaring Pemberdayaan Hukum) menyelenggarakan satu seri pertemuan virtual pada tanggal 26 September, 14 Oktober dan 28 Oktober 2020 untuk memungkinkan para aktor keadilan dari seluruh kawasan Asia-Pasifik berbagi pengalaman, solusi dan tantangan terkait pemberdayaan hukum.

Topik sesi meliputi: *Adaptation and Collaboration, Grassroots Work in the Pandemic* (Adaptasi dan Kolaborasi, Upaya Akar Rumput dalam Pandemi) (26 September); *People-Centered Justice and Best Practices* (Keadilan Berfokus pada Rakyat dan Praktik Terbaik) (14 Oktober) dan *Partnerships and Resources* (Kemitraan dan Sumber Daya) (28 Oktober). Lebih dari 10.000 peserta dari pemerintah, pengadilan, masyarakat sipil dan sektor swasta di seluruh Asia-Pasifik menghadiri atau mengamati pertemuan virtual tersebut.

Dokumen ini menggarap hasil diskusi dan rekomendasi dari seri tersebut, dimaksudkan untuk mendukung advokasi dan keterlibatan kolektif untuk lebih merealisasikan ambisi di balik SDG 16.

## Temuan Utama

Seri virtual ini menyoroti berbagai tantangan signifikan yang dihadapi oleh para praktisi pemberdayaan hukum dalam melangsungkan keadilan di komunitas masing-masing setiap hari. Pandemi COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan yang ada berdasarkan kasta, agama, jenis kelamin, disabilitas, kebangsaan dan bahasa serta menciptakan hambatan dan tantangan yang baru dan unik. Peserta juga membahas tantangan dalam memanfaatkan layanan kesehatan selama pandemi dan dalam tindakan pencegahan di pemukiman informal di kota-kota besar. Para migran juga dikenal sangat rentan karena perawatan kesehatan yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang lebih buruk, serta kondisi kehidupan yang terlalu padat, sehingga mereka berisiko lebih besar terkena infeksi. Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan juga ditekankan.

Banyak lembaga peradilan telah ditutup sebagian atau seluruhnya di segenap wilayah akibat dari pandemi. Demikian pula, banyak pengacara, paralegal, dan pekerja keadilan garis depan lainnya tidak dapat menghubungi komunitas yang dilayani. Kesenjangan digital semakin membatasi akses untuk mengajukan dan mencari informasi dan bantuan. Peserta juga membahas tantangan dari pembatasan yang diberlakukan pada penyusunan, perserikatan, dan pengungkapan pendapat, mahupun ancaman terhadap kebebasan perorangan melalui penangkapan dan pengawasan yang ilegal. Akses teknologi yang minim juga menyulitkan para aktor akar rumput untuk berpartisipasi dalam pertemuan virtual.

Berbarengan dengan tantangan tersebut juga muncul **kesempatan** baru untuk inovasi dan kalibrasi ulang menuju keadilan berfokus pada rakyat. Pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat dimulai dengan memahami kebutuhan rakyat untuk keadilan dan ditindaklanjuti dengan berbagai solusi baru untuknya. Layanan hukum dan keadilan berfokus pada rakyat tersedia di seluruh jajaran peradilan dalam berbagai format, program dan layanan. Layanan tersebut diluncurkan lewat sistem yang terbuka dan inklusif, dan bekerja sama dengan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan ketenagakerjaan. Bila rakyat mencari bantuan untuk menyelesaikan sesuatu kebutuhan, bantuan harusnya bisa ditemukan, terlepas dari ke mana mereka mencarinya.

## Rekomendasi

Pertemuan virtual tersebut menyoroti beberapa rekomendasi utama untuk memajukan kerja kolektif para praktisi hukum di kawasan Asia-Pasifik:

### Rekomendasi untuk Meningkatkan Praktik Baik untuk Kelangsungan Keadilan Berfokus pada Rakyat

- **Pemerintah** harus memperkuat penggunaan pendekatan berbasis data untuk memahami kebutuhan rakyat untuk keadilan, termasuk survei kebutuhan keadilan.
- **Pemerintah, peradilan dan masyarakat sipil** harus memastikan kesetaraan gender dan secara bermakna menangani diskriminasi gender dalam pemberian layanan keadilan, mengingat banyak sekali tantangan yang dihadapi kalangan perempuan yang mencari dan memberikan keadilan. Memastikan akses keadilan untuk penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya harus diprioritaskan, dengan memperhatikan keadaan khusus dari masing-masing kelompok.
- **Pemerintah dan masyarakat sipil** harus memperkuat kemitraan dan kolaborasi mereka melalui inisiatif multi pemangku kepentingan seperti Open Government Partnership.

### Rekomendasi untuk Menangani Tantangan baru Muncul dari Pandemi COVID-19

- **Pemerintah** harus memprioritaskan keadilan berfokus pada rakyat sebagai komponen tidak terpisahkan dari strategi respons dan pemulihan terkait COVID-19.
- **Pemerintah** harus memanfaatkan kekuatan sistem peradilan yang beragam. Mereka harus mempertimbangkan pendirian satuan tugas pandemi lintas sektor di bawah Kementerian Kehakiman, dengan perwakilan dan masukan dari masyarakat sipil, untuk menilai kebutuhan sistem peradilan dan memprioritaskan tanggapan.
- **Perwakilan dari profesi hukum, sektor swasta (khususnya perusahaan teknologi), paralegal dan lainnya yang memberikan layanan keadilan di masyarakat** harus rapat dari waktu ke waktu untuk memberikan masukan dan mengkoordinasi tanggapan yang efektif terhadap krisis dari para aktor keadilan.

- **Para profesional keadilan di pemerintahan dan masyarakat sipil** harus bekerja sama dengan sektor lain supaya pembatasan dan kebijakan kesehatan publik yang baru di bidang perumahan, pekerjaan, migrasi dan selainnya membantu mencegah ketidakadilan dan bukan membebani sektor peradilan tanpa perlu.
- **Pemerintah** harus memastikan bahwa pekerja keadilan garis depan tetap menerima gaji mereka, berupaya mencari dana tambahan dari donor internasional dan filantropi jika diperlukan.
- **Pemerintah** harus secara proaktif memasukkan transparansi ke dalam pengambilan keputusan terkait pandemi dan operasi sistem peradilan selama pandemi, dengan sistem peradilan yang lebih terbuka sebagai basis untuk membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah dalam jangka panjang.

## Rekomendasi tentang Keberlanjutan dan Pembiayaan Keadilan untuk Semua

- **Organisasi masyarakat sipil dan organisasi pemberdayaan hukum berbasis komunitas** harus menggunakan proses domestik dan global seperti [Open Government Partnership](#) (Kemitraan Pemerintah Terbuka) dan [UN Sustainable Development Goals Partnerships Platform](#) (Platform Kemitraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB) untuk mendorong dan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah.
- **Pemerintah** harus segera mengalihkan pendanaan layanan ke pelayanan online, seperti kampanye sosialisasi, saluran bantuan, dan mediasi sengketa lewat online.
- **Pemerintah** harus meningkatkan investasi untuk keadilan yang berarti dan kesadaran akan hak supaya rakyat cukup memahami hak-hak mereka dan penyelesaian yang dapat ditempuh.
- **Para donor** harus melindungi sistem peradilan bila negara yang berutang mencari dana talangan internasional dan mempertahankan bagian untuk keadilan dari bantuan pembangunan luar negeri.
- **Perwakilan dari profesi hukum, termasuk dari sektor swasta** harus menyusun organisasi untuk layanan hukum pro bono dan memberikan suara dukungan untuk advokasi jaringan pemberdayaan hukum.
- **Sektor swasta harus dimobilisasi untuk mendukung keadilan bagi semua** – yang berdampak pada pemangku kepentingan mereka seperti konsumen, karyawan, dan komunitas yang mereka layani – melalui dukungan finansial dan / atau natura.

## Sumber daya

- Untuk sumber daya tambahan, silakan kunjungi:

Keadilan dalam Pandemi: [Justice for All and the Public Health Emergency](#) (Keadilan untuk Semua dan Darurat Kesehatan Masyarakat)

- Keadilan dalam Pandemi: [Justice for All and the Economic Crisis](#) (Keadilan untuk Semua dan Krisis Ekonomi)
- [Grassroots Justice in a Pandemic](#) (Keadilan Akar Rumput dalam Pandemi): Memastikan Respons dan Pemulihan yang Adil, Keadilan untuk Semua, dan Para Pelopor

- Cuplikan Solusi: [Domestic Violence in Pandemic](#), Pathfinders (Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandemi, Pathfinder)
- Cuplikan Solusi: [Court Innovations in a Pandemic](#), Pathfinders (Inovasi Pengadilan dalam Pandemi, Pathfinder)
- Cuplikan Solusi: [Legal Empowerment in a Pandemic](#), Pathfinders (Pemberdayaan Hukum dalam Pandemi, Pathfinder)
- Untuk mempelajari bagaimana Open Government Partnership bekerja untuk memperluas daya tanggap, akuntabilitas, dan inklusifitas dalam semua sistem keadilan, kunjungi [halaman Keadilan OGP](#).
- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang komitmen pada keadilan dan bagaimana membuat komitmen pada keadilan lihat [Commitments Fact Sheet](#) (Lembar Fakta Komitmen) Pathfinder.

